

# **PERSPEKTIF HAK IMUNITAS KURATOR SAAT PENGURUSAN DAN PEMBERESAN HARTA PAILIT IRFAN EKA SAPUTRA**

## **ABSTRAK**

Berdasarkan pada Pasal 16 UU Kepailitan dan PKPU terhitung sejak tanggal putusan Pailit ditetapkan, kurator berwenang melaksanakan tugas pengurusan dan pemberesan harta pailit. Tujuan utama kepailitan adalah pembagian harta debitur pailit oleh kurator kepada semua kreditornya. Kepailitan dimaksudkan untuk menghindari terjadinya sistem terpisah atau eksekusi terpisah oleh kreditur dan menggantikannya dengan mengadakan sistem bersama, sehingga kekayaan debitur dapat dibagikan kepada semua kreditur sesuai dengan haknya masing-masing. Dalam instrument kepailitan terdapat pihak-pihak dari yang berperan dalam pengurusan harta pailit yaitu Hakim Pengawas dan Kurator yang dimana dinyatakan pada Pasal 15 ayat (1) UU Kepailitan dan PKPU bahwa dalam penetapan pernyataan pailit harus diangkat: 1. Kurator 2. Hakim pengawas yang diangkat oleh Hakim pengadilan. Tujuan dari penelitian ini adalah 1. Untuk menganalisis hak imunitas kurator saat pengurusan dan pemberesan harta pailit dan 2. Untuk mengetahui dan menganalisis hukum terhadap Kurator dalam melaksanakan tugas dan kewenangannya. Dengan metode penelitian normatif yuridis diketahui bahwa 1. Hak imunitas kurator saat pengurusan dan pemberesan harta pailit lahir secara otomatis karena kedudukannya sebagai perwakilan pengadilan yang menjalan kekuasaan kehakiman selama bertindak dalam statutory obligations. Kurator dalam melakukan tugas pemberesan dan pengurusan harta pailit harus independent sehingga tidak merugikan salah satu pihak. Kurator harus dapat memposisikan dirinya dengan baik terhadap debitur, kreditur dan Hakim Pengawas, agar dapat melakukan tugasnya dengan maksimal. 2. Perlindungan hukum terhadap Kurator dalam melaksanakan tugas dan kewenangannya dalam Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang, belum menjamin perlindungan hukum bagi kurator. Hal ini terjadi karena dalam undang-undang kepailitan terdapat inkonsistensi antara beberapa pasal diantaranya Pasal 9 dan Pasal 16, akibatnya dapat mempengaruhi kinerja kurator dalam melakukan pengurusan dan pemberesan harta pailit debitur.

**Kata Kunci :** Imunitas, Kurator, Pailit

# ***CURATOR IMMUNITY RIGHTS PERSPECTIVE WHEN ARRANGEMENT AND ORDERS OF BANKRUPT TREASURES***

***IRFAN EKA SAPUTRA***

## ***ABSTRACT***

*Based on Article 16 of the Bankruptcy and PKPU Law as of the date of the Bankruptcy verdict set, the curator shall be authorized to perform the task of handling and ordering of bankrupt property. The main purpose of bankruptcy is the division of bankrupt debtors' property by the curator to all the creditors. Bankruptcy is intended to avoid the occurrence of separate systems or separate executions by creditors and replace them with a joint system, so that the debtor's wealth can be distributed to all creditors in accordance with their respective rights. In the bankruptcy instrument there are parties from those who play a role in the management of bankruptcy assets of the Supervisory Judge and the Curator which is stated in Article 15 paragraph (1) of the Bankruptcy and PKPU Law that in the declaration of bankruptcy statements should be lifted: 1. Curator 2. Judge supervisor who was appointed by a court judge. The purpose of this study is 1. To analyze the rights of curatorial immunity when handling and ordering of bankrupt property and 2. To know and analyze the law against the curator in carrying out its duties and authorities. With the normative juridical research method it is known that 1. The right of curatorial immunity when handling and ordering of bankruptcy property is born automatically because of its position as a court representative who runs the judicial power during acting in statutory obligations. The curator in performing the duties and handling of the bankruptcy property must be independent so as not to harm either party. The curator must be able to position himself well against the debtor, creditor and Supervisory Judge, in order to perform his duties with the maximum. 2. Legal protection of the Curator in performing its duties and authorities in Law Number 37 Year 2004 concerning Bankruptcy and Postponement of Debt Payment Obligations, has not guaranteed legal protection for the curator. This happens because in bankruptcy law there are inconsistencies between several articles such as Article 9 and Article 16, consequently can affect the performance of curators in managing and securing debtor bankruptcy property.*

***Keywords*** : *Immunity, Receiver, Bankruptcy*